

Politik Tata Kelola Bencana: Analisis Kepentingan Antar Aktor dalam Kasus Pengelolaan Bencana Banjir di Kota Medan Tahun 2023

Friech Gunana Depary, Laila Kholid Alfirdaus, Dzunuwanus Ghulam Manar

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The study of disaster governance analyzes the interests of actors by putting the knowledge of disaster actors or stakeholders as the focus of the study. In the concept of governance, actors in certain domains of government can be referred to as actors, these actors are not necessarily the government, but can also be private, community and other actors. In an effort to minimize the occurrence of flood disasters, the involvement of actors or stakeholders is needed. This research aims to analyze the interests between actors in flood disaster management efforts and the implications of cross-interests in flood disaster management in Medan City. Data collection techniques in this study used observation, interviews and literature studies with qualitative descriptive methods. The results showed that the Government and the Regional Disaster Management Agency of Medan City are the main stakeholders. Then the labosude community, PMI, basarnas, online motorcycle taxi community, PMI, SDABMBK Office are supporting stakeholders. Furthermore, the community as a stakeholder directly affected by the disaster. Actors in flood disaster management have different roles and interests. Each actor in this study has coordinated but in its implementation there are obstacles with the different interests of each actor that occur in convergence and divergence. Then there are limited resources and accurate information in planning and implementing flood disaster management in Medan City and the absence of policies formulated inclusively and deliberatively by the government in disaster management, both before, during and after disasters.

Keywords: Interests, Politics of Governance, Cross-cutting Implications

ABSTRAK

Kajian disaster governance menganalisis kepentingan aktor dengan meletakkan pengetahuan pelaku atau pemangku kepentingan kebencanaan sebagai fokus kajian. Dalam konsep governance, pelaku dalam ranah pemerintahan tertentu dapat disebut sebagai aktor, aktor tersebut tidak mesti adalah pemerintah, melainkan juga dapat swasta, masyarakat dan aktor lainnya. Dalam upaya meminimalisir terjadinya bencana banjir dibutuhkan keterlibatan dari aktor atau pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan antar aktor dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan implikasi saling-silang kepentingan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan merupakan *stakeholder* utama. Kemudian komunitas labosude, PMI, basarnas, komunitas ojek online, PMI, Dinas SDABMBK merupakan *stakeholder* pendukung. Selanjutnya, Masyarakat sebagai *stakeholder* yang terdampak langsung oleh bencana. Aktor didalam pengelolaan bencana banjir memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Setiap aktor di dalam penelitian ini telah melakukan koordinasi akan tetapi pada implementasinya terdapat kendala dengan adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap aktor yang terjadi secara *konvergensi* maupun *divergensi*. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya serta informasi yang akurat dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan serta tidak adanya kebijakan yang dirumuskan secara inclusive dan deliberatif oleh pemerintah dalam pengelolaan bencana, baik sebelum, saat dan setelah bencana.

Kata Kunci : Kepentingan, Politik Tata Kelola, Implikasi saling silang

PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkontribusi pada ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam karena lokasinya berada di garis khatulistiwa, di antara dua

benua dan dua samudra. Di sisi lain wilayah ini memiliki kondisi geografis, hidrologis, demografis serta geologis yang sangat rentan terhadap bencana, skala kecil maupun skala besar. Dalam hal ini, diperlukan suatu tindakan yang terkoordinasi dengan baik, sistematis dan terpadu. Ada tiga kategori bencana yang diklasifikasikan dalam pemicu potensi dari bencana di wilayah Indonesia, bencana yang berasal dari alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Untuk bencana yang berasal dari alam berupa letusan gunung, angin topan,

gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran hutan alami. Kejadian alam dan tindakan manusia adalah faktor yang dapat menyebabkan bencana. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dapat memiliki efek yang merusak dan memerlukan intervensi dari berbagai aktor untuk menanganinya. Kebijakan publik yang efektif dan tata kelola yang baik adalah faktor penting dalam penanggulangan bencana. Hal ini mencakup peran pemerintah, lembaga swasta, LSM dan masyarakat dalam mengelola risiko bencana dan menyelamatkan nyawa maupun harta benda. Berbagai aktor dalam pengelolaan bencana, seperti pemerintah, LSM, swasta, masyarakat dan aktor lainnya yang terlibat memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Individu, kelompok, dan organisasi dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Budimanta et al. (2008), pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, golongan, komunitas atau masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Individu, kelompok, golongan, komunitas atau masyarakat dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan jika mereka pada dasarnya menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

Fokus tata kelola tidak hanya semata pada tataran teknokratik seperti teknis dan administrasi, melainkan juga dapat berfokus pada tataran sosial seperti pada kondisi aktor yang terlibat dan kepentingannya. Kepentingan dari setiap aktor diperlukan dalam pembuatan kebijakan yang terkadang hal ini diabaikan (Ardianto, 2016: 197).

Kajian disaster governance dengan menganalisis kepentingan aktor berarti meletakkan pengetahuan pelaku atau pemangku kepentingan kebencanaan sebagai fokus kajian. Dalam konsep governance, pelaku dalam ranah pemerintahan tertentu dapat disebut sebagai aktor, aktor tersebut tidak mesti adalah pemerintah, melainkan juga dapat swasta, masyarakat dan aktor lainnya. (Mas'udi & Karim, 2021: 195). Oleh sebab itu, maksud wacana tata kelola kebencanaan dalam tulisan ini adalah sejauh mana kepentingan aktor dalam isu-isu disaster governance. Dalam analisis kepentingan aktor dalam kasus pengelolaan bencana banjir, pemerintah memiliki peran utama dalam menjamin koordinasi dan tata kelola penanggulangan bencana. Mereka harus memastikan bahwa rencana penanggulangan bencana disusun dan diperbarui secara periodik, serta meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.

Lembaga seperti Dinas Pemadam Kebakaran, PMI, Satpol PP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Mereka harus berkoordinasi dan bermitra untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Dalam informasi BPBD tentang bencana banjir di Kota Medan pada 16 September 2023. Informasi ini melibatkan empat kecamatan yang terdampak, termasuk Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, dan Kecamatan Medan Helvetia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan telah melakukan upaya penanggulangan bencana banjir mengidentifikasi beberapa masalah, seperti kurangnya kemampuan dan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas lain, serta ruang lingkup tugas pemerintah yang beragam. Dalam keadaan darurat bencana, manajemen yang baik dan kerja sama dengan organisasi swasta dan publik sangat diperlukan karena masyarakat sangat membutuhkan tindakan cepat. Setiap pihak harus bekerja sama satu sama lain untuk memperbaiki kerusakan setelah bencana. Setiap pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Penelitian sebelumnya mungkin telah meneliti beberapa aspek manajemen bencana, termasuk manajemen risiko dan peran pemerintah. Namun, ada kebutuhan untuk memahami mengenai saling-silang kepentingan dari para pemangku kepentingan dan kepentingan aktor yang terlibat pengelolaan bencana, khususnya pada bencana banjir. Penelitian ini mengkaji peran dan kepentingan aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali data untuk mendapatkan temuan penelitian yang komprehensif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara bersama para informan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan antar aktor dalam pengelolaan banjir di Kota Medan. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana *konvergensi* dan *divergensi* antar aktor yang terlibat. Subjek penelitian berfokus pada aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan bencana banjir di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Stakeholder* dalam Penanganan Bencana Banjir

Teori Handayani dan Warsono digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam penelitian ini (Talib, 2020). Pemangku kepentingan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan teori ini: pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan pendukung, dan pemangku kepentingan primer atau masyarakat.

1. *Stakeholders* Utama

Pemangku kepentingan kunci sangat berpengaruh dan memiliki kepentingan langsung serta signifikan dalam proses pengelolaan bencana banjir di Medan. Para pemangku kepentingan kunci memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses tersebut. Pemerintah dan BPBD merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan. Sebagai pemangku kepentingan kunci, BPBD memiliki pengaruh dan wewenang yang signifikan untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan bencana dilakukan dengan baik. Selain itu, BPBD menjalankan fungsi koordinasi, kepemimpinan, dan implementasi dalam pengelolaan bencana banjir dan pemerintah memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk tanggap bencana.

2. *Stakeholder* Pendukung

Pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses kegiatan pengelolaan banjir di Kota Medan tetapi memiliki kepedulian terhadap proses pengembangan suatu program dan kebijakan. *Stakeholders* pendukung dapat memberikan masukan atau saran yang dapat membantu *stakeholders* utama. Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan, Dinas SDABMBK, Komunitas Labosude, PMI, Basarnas, Ojek Online menjadi *stakeholders* pendukung. Tugas dari *stakeholders* ini adalah memberikan masukan atau saran, mengawasi pelaksanaan kebijakan, membantu *stakeholders* lainnya dan mengkomunikasikan informasi terkait bencana.

3. Masyarakat

Pihak yang terkena dampak bencana secara langsung adalah masyarakat di Kota Medan. Peristiwa bencana banjir memberikan berbagai dampak negatif kepada warga, yaitu: masalah air bersih, terhambatnya aktivitas masyarakat, kerugian ekonomi, masalah Kesehatan dan kemungkinan adanya korban jiwa.

B. Kepentingan Antar *Stakeholder*: *Konvergensi dan Divergensi*

Stakeholder utama, pendukung dan masyarakat dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pemerintah dan BPBD sebagai *stakeholder* utama memiliki kepentingan yang signifikan. Sebagai *stakeholder* utama mereka memiliki wewenang atas pengambilan keputusan dan memiliki ikatan. *Stakeholder* pendukung, seperti, Lembaga pemerintahan, LSM dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan memiliki kepentingan lebih luas dan tidak langsung terkait dalam penanggulangan banjir. *Stakeholder* pendukung memiliki peran dalam memberikan bantuan dan dukungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cara mengurangi dampak bencana banjir yang terjadi. Kepentingan *stakeholder* pendukung meliputi pengembangan program pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir serta memberikan bantuan logistik dan medis.

1. Konvergensi

Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat memiliki kepentingan yang saling bertemu dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu kesejahteraan dan keselamatan dari masyarakat Kota Medan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan membuat kebijakan sedangkan masyarakat memiliki kepentingan

langsung dalam hal keselamatan dan kesejahteraannya. Kepentingan ini dapat bertemu dalam upaya pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dari hasil Penelitian, disimpulkan bawa adanya kepentingan yang saling bertemu antara BPBD dan Masyarakat dimana aktor-aktor tersebut saling memiliki kepentingan didalam kesejahteraan dan keselamatan dari masyarakat. Pemerintah memiliki kepentingan yang signifikan dalam penanggulangan bencana banjir. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Kepentingan ini dapat berkonvergensi dengan kepentingan masyarakat yang ingin melindungi diri dan properti mereka dari dampak bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kepentingan terkait tanggung jawabnya dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Sedangkan, Masyarakat memiliki kepentingan yang terkait dengan keamanan dan kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga. Kepentingan ini dapat berkonvergensi dengan kepentingan pemerintah yang ingin melindungi rakyat dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

2. Divergensi

BPBD dan Komunitas Labosude memiliki kepentingan yang berbeda dalam penanggulangan bencana banjir. BPBD memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya dan membuat kebijakan, sedangkan Komunitas Labosude memiliki kepentingan yang terkait dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan bantuan logistik dan medis. Kepentingan ini dapat berlawanan jika BPBD tidak memberikan ruang bagi Komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya Divergensi antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Deli Tua, adanya terjadi perbedaan dan konflik kepentingan terkait drainase di antara kedua wilayah tersebut. terjadi permasalahan dalam hal pembangunan drainase yang berada di wilayah-wilayah tertentu dan adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Deli Serdang. Potensi benturan kepentingan antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait dengan kerjasama yang meliputi berbagai aspek, termasuk penanggulangan bencana banjir. Meskipun kerjasama tersebut bertujuan untuk kemajuan wilayah dan masyarakat, namun terdapat potensi perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. Dalam konteks penanggulangan bencana banjir, terdapat

kemungkinan perbedaan pendekatan, alokasi anggaran, dan prioritas dalam upaya penanggulangan banjir yang dapat menimbulkan ketegangan antara kedua pemerintahan. Kepentingan antar *stakeholder* dapat berkonvergensi dan berdivergensi dalam penanggulangan bencana banjir. Konvergensi dapat terjadi ketika kepentingan *stakeholder* berpadu dan berfokus pada tujuan yang sama, seperti melindungi diri dan properti dari dampak bencana. Divergensi dapat terjadi ketika kepentingan *stakeholder* berbeda dan memiliki tujuan yang tidak sama.

C. Implikasi Saling-Silang Kepentingan Antar *Stakeholder*

Implikasi saling-silang dari kepentingan dalam kepentingan antar *stakeholder* dapat memiliki konsekuensi yang kompleks dan beragam. Kepentingan saling-silang dapat membantu mengelola bencana dalam beberapa situasi, tetapi kepentingan yang bertentangan dapat mempersulit atau bahkan mendorong konflik lain. Kepentingan yang saling-silang dapat membantu dalam mengkoordinasikan upaya pengelolaan bencana, *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang sama dapat bekerja sama untuk mengembangkan strategi penanggulangan bencana yang efektif.

Dalam membantu korban bencana banjir, dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kota Medan dengan masyarakat serta organisasi sosial, seperti Labosude, PMI yang memiliki kepentingan yang sama dalam membantu korban bencana banjir. Mereka bekerja sama dalam memberikan bantuan, menyelamatkan dan mengawasi korban. Kepentingan saling-silang dapat membantu dalam mengumpulkan sumber daya yang lebih luas untuk pengelolaan bencana. Sumber daya yang berbeda dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan bencana. Dalam hal ini, sumber daya dapat berupa fisik, manusia, finansial, teknologi, Setiap *Stakeholder* yang terkait dapat membantu dan berkontribusi didalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan.

Stakeholders sangat penting dalam penyelenggaraan pengelolaan bencana banjir dan hubungan yang terjalin antara aktor-aktor yang ada memberikan peluang untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Ketika semua pihak yang terlibat dapat saling mempercayai, pengelolaan bencana banjir dapat berjalan secara optimal. Kepentingan yang sinkronisasi setiap *stakeholder* dapat membantu dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan. Kepentingan antar *stakeholder* yang berlawanan dapat mempersulit penanggulangan bencana, kepentingan yang berlawanan dapat mendorong konflik antar *stakeholder*. *Aktor-aktor* yang memiliki tujuan

yang berbeda sehingga dapat terjadi konflik dalam mengelola bencana. Dalam hal ini berupa, Keterbatasan sumber daya dalam menanggulangi bencana dapat menjadi pemicu konflik di dalam menangani bencana yang terjadi, Perbedaan tujuan antara pihak yang terlibat dalam pengelolaan bencana. Misalnya Pihak yang berfokus pada penanggulangan bencana dapat berkonflik dengan pihak yang berfokus pada rehabilitasi wilayah yang terdampak. Dalam hal ini konflik kepentingan yang terjadi antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Deli Serdang, kedua pihak ini dapat berkonflik karena memiliki tujuan dan perspektif yang berbeda dalam situasi bencana. Pemerintah Kota Medan memiliki fokus pada memulihkan kesejahteraan masyarakat sedangkan Pemerintah Deli Serdang lebih fokus dalam memulihkan infrastruktur dan fasilitas publik. Konflik terjadi ketika pihak yang berfokus pada penanggulangan bencana beranggapan bahwa rehabilitasi wilayah yang terdampak harus ditunda hingga bencana selesai diatasi, sedangkan pihak yang berfokus pada rehabilitasi beranggapan harus dilakukan segera agar masyarakat dapat kembali berfungsi normal. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendekatan dan tujuan antara pihak yang berfokus pada penanggulangan bencana dan pihak yang berfokus pada rehabilitasi wilayah yang terdampak.

Kemudian, keterbatasan infrastruktur seperti sistem drainase yang buruk sehingga menyebabkan konflik dalam pengelolaan

bencana. Karena sumber daya dan infrastruktur yang tidak memadai untuk menangani bencana. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, tantangan seperti fasilitas yang kurang dimanfaatkan, infrastruktur yang tidak memadai, kekurangan sumber daya manusia dan kendala anggaran menghambat implementasi yang efektif dari upaya penanggulangan bencana, mempengaruhi distribusi logistik selama keadaan darurat. Dalam hal ini, kepentingan yang tidak sinkronisasi dapat meningkatkan konflik dan kesulitan dalam menghadapi bencana, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak bencana. Pemerintah memiliki kepentingan yang terkait dengan tanggung jawabnya dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan yang terkait dengan keamanan dan kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga. Kepentingan ini dapat berlawanan karena pemerintah mungkin memiliki kepentingan yang lebih luas, seperti memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan masyarakat mungkin memiliki kepentingan yang lebih spesifik, seperti melindungi diri dan properti mereka.

Dampak kepentingan yang berlawanan dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan adalah Kesulitan dalam berkoordinasi Kepentingan yang berlawanan dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi antar *stakeholder*, sehingga upaya mengatasi bencana tidak dapat dilaksanakan secara

efektif, Kepentingan yang berlawanan dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan bencana, sehingga masyarakat tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam menghadapi bencana. Kepentingan yang berlawanan juga dapat menyebabkan kurangnya inovasi dalam upaya pengelolaan bencana, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kepentingan yang berlawanan dapat terjadi ketika kepentingan *stakeholder* berbeda dan memiliki tujuan yang tidak sama. Diperlukannya pemahaman dalam mengelola kepentingan antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana banjir untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi bencana.

TEMUAN AKADEMIK

Penelitian ini memperlihatkan fenomena yang muncul dari adanya kepentingan antar aktor yang terlibat yang melibatkan aktor - aktor, seperti: BPBD, pemerintah, komunitas Labosude, basarnas, PMI, komunitas ojek online, masyarakat. Serta bagaimana kepentingan yang saling bertemu dan tidak saling bertemu dalam penanggulangan bencana banjir.

“Analisis Kepentingan Antar Aktor dalam Kasus Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan memberikan sebuah pernyataan baru. Pernyataan tersebut mengenai koordinasi kolaborasi yang telah dilakukan oleh BPBD, Komunitas Labosude, Masyarakat, PMI dan

aktor lainnya yang telah melakukan koordinasi melalui rapat maupun forum. Forum yang dilakukan melibatkan 151 kelurahan yang digunakan untuk memfasilitasi aktor-aktor untuk berdialog dan mengenai bagaimana menghadapi bencana yang terjadi. Penelitian yang dilakukan bersikap deskriptif ini mendukung temuan penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini membagi stakeholder menjadi 3 kategori, yaitu : *stakeholder* utama, *stakeholder* pendukung, masyarakat. Dalam penelitian analisis antar aktor pengelolaan bencana banjir di Kota Medan ditemukan adanya kepentingan saling bertemu dan kepentingan yang tidak saling bertemu.

Penelitian ini berkontribusi pada bidang pengetahuan yang menunjukkan kepentingan aktor sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir. *Stakeholder* ini memiliki peran yang signifikan sehingga dapat membantu efektivitas penanggulangan bencana banjir peranannya di dalam diskusi akademik berkaitan dengan kepentingan, pengembangan kebijakan, peningkatan koordinasi. Kemudian ada Divergensi dan Konvergensi Kepentingan, dimana terjadinya kepentingan yang saling bertemu dan tidak bertemu pada penelitian sebelumnya hal ini tidak dibahas dan hanya berfokus pada kolaborasinya. Dalam penelitian ini dibahas analisis yang lebih dalam tentang peran dan interaksi antar aktor dalam penanggulangan

bencana banjir. Analisis ini membantu memahami bagaimana aktor-aktor seperti pemerintah, masyarakat, dan LSM bekerja sama dalam menghadapi bencana banjir.

Pada diskusi akademik penelitian ini juga berkontribusi pada sisi politik tata kelola bencana dengan menggambarkan konflik kepentingan yang saling bertolak belakang. Dimana penelitian ini menjelaskan adanya kepentingan yang tidak saling bertemu antara pemerintah Kota Medan dengan pemerintah Deli Serdang terkait pembangunan drainase. Dilihat dari sisi lain dari kepentingan penelitian ini memberikan gambaran terkait konflik dari perbedaan kepentingan aktor dan kepentingan dari aktor yang bertemu hal ini terjadi antara Pemerintah dan BPBD yang memiliki kepentingan sama dalam membantu masyarakat. Analisis kepentingan aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan menunjukkan bahwa memerlukan kerjasama yang baik dan kepentingan antar berbagai aktor.

KESIMPULAN

Analisis kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan melihat peran masing-masing aktor yang saling berinteraksi dan berkonflik dalam mengatasi bencana banjir. Hasil penelitian menemukan bahwa peran aktor berbeda-beda dilihat dari kepentingan dan sistem dari aktor di dalam penanggulangan bencana. Di dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan kepentingan dan

pengaruh/kekuasaan: stakeholder utama, pendukung dan masyarakat. Pada pengelolaan bencana banjir di Kota Medan setiap aktor melakukan kerjasama dan koordinasi akan tetapi pada implementasinya terdapat kendala dalam perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor. Kepentingan utama pemerintah hanya berfokus pada kebijakan dan regulasi sedangkan LSM berfokus pada pemberdayaan komunitas dan peningkatan kapasitas lokal. Penanggulangan bencana banjir di Kota Medan memiliki beberapa kendala meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya informasi yang akurat serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi masih kurang. Dalam Pelaksanaan pengelolaan bencana banjir di Kota Medan tidak ada kebijakan yang dirumuskan secara inclusive dan deliberatif oleh pemerintah dalam pengelolaan bencana, baik sebelum, saat dan setelah bencana.

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan, terdapat implikasi saling silang kepentingan dengan melihat kepentingan yang saling bertemu dan kepentingan yang tidak saling bertemu di antara aktor-aktor yang ada dan terlibat. Pemerintah, BPBD dan Masyarakat memiliki kepentingan yang saling bertemu dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan dari masyarakat di Kota Medan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan membuat kebijakan sedangkan masyarakat

memiliki kepentingan langsung dalam hal keselamatan dan kesejahteraannya. Kepentingan ini bertemu melalui upaya pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dalam hal membantu korban bencana banjir, pemerintah, BPBD, Komunitas Labosude, PMI, Basarnas, ojek online serta masyarakat bekerjasama dan berkoordinasi dalam membantu korban bencana banjir. Semua stakeholder yang terlibat ini memberikan bantuan berupa barang maupun informasi untuk menyelamatkan dan mengawasi korban. Dalam kepentingan yang saling bertolak belakang adalah antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Deli Tua, dengan adanya terjadi perbedaan dan konflik kepentingan terkait drainase diantara kedua wilayah tersebut. Terjadi permasalahan pembangunan drainase dan kesulitannya berkoordinasi sejak ditetapkannya daerah otonom dengan perbedaan pendekatan, alokasi anggaran dan prioritas. Kemudian partisipasi dan koordinasi semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir masih kurang untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan analisis kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan, maka terdapat saran diberikan.

Dalam koordinasi antar stakeholder perlu ditingkatkan komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran untuk membantu penanggulangan bencana banjir. Masyarakat perlu diberikan edukasi untuk memanfaatkan teknologi dalam efektivitas penanggulangan bencana banjir dan meningkatkan kapasitas pemerintah serta masyarakat untuk menghadapi bencana banjir dengan cara meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan bencana banjir. Dalam kolaborasi diperlukan inovasi yang diciptakan oleh seluruh stakeholder yang ikut serta dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan agar tidak terjadinya perbedaan kepentingan antar stakeholder. Pelaksanaan dalam pengelolaan bencana Perlu adanya kebijakan yang dirumuskan secara inclusive dan deliberatif oleh pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan yang ikut dalam pengelolaan bencana baik sebelum, saat dan setelah bencana.

Diperlukan keterlibatan dan pemahaman dari setiap aktor terutama masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan bencana di Kota Medan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir di Kota Medan diperlukan peningkatan sistem informasi yang lebih baik, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan mekanisme kolaborasi antar aktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, A. Q., Nagy, G. J., Masud, M. M., Filho, W. L., & Doberstein, B. (2019). Evaluating the impacts of climate disasters and the integration of adaptive flood risk management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101241>
- Atanga, R. A. (2020). The role of local community leaders in flood disaster risk management strategy making in Accra. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101358>
- Bera, M. K. (2023). Flood emergency management in a municipality in the Czech Republic: A study of local strategies and leadership. *Natural Hazards Research*, 3(3), 385–394. <https://doi.org/10.1016/j.nhres.2023.06.004>

- Bustillos Ardaya, A., Evers, M., & Ribbe, L. (2019). Participatory approaches for disaster risk governance? Exploring participatory mechanisms and mapping to close the communication gap between population living in flood risk areas and authorities in Nova Friburgo Municipality, RJ, Brazil. *Land Use Policy*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104103>
- Dombrowsky, Wolf 1983, —Solidarity during snow-disasters, *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, vol. 1, no. 1, pp. 189-205.
- Dynes, Russell 2002, The importance of social capital in disaster response, Preliminary Paper, no. 327, Disaster Research Center, University of Delaware.
- Fernandez, M. (2021). Risk perceptions and management strategies in a post-disaster landscape of Guatemala: Social conflict as an opportunity to understand disaster. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 57. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102153>
- Guerrero, A. M., Bodin, Nohrstedt, D., Plummer, R., Baird, J., & Summers, R. (2023). Collaboration and individual performance during disaster response. *Global Environmental Change*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102729>
- Hendriks, T. D., & Boersma, F. K. (2019). Bringing the state back in to humanitarian crises response: Disaster governance and challenging collaborations in the 2015 Malawi flood response. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 40. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101262>
- Ilmu Sosial, J., Dan Humaniora, P., Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan, C., & Tanjungpura Jalan Hadari Nawawi, U. (n.d.). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan Nahot Tua Parлиндungan Sihalo*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Isa, M., & Mangifera, L. (n.d.). *Analisis Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten*.
- Krisanto YA. 2011. Relokasi Korban Bencana: Legalistik vs Kultural Historis (Kajian Penolakan Warga Lereng Merapi terhadap Kebijakan Relokasi).
- Kurniawan, A., & Rezki, D. (n.d.). Collaborative Governance Dalam

- Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.83> 25
- Maarif S, Pramono R, Kinseng RA, Sunarti E. 2012. Kontestasi Pengetahuan dan Pemaknaan tentang Ancaman Bencana Alam. *Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 1*, Tahun 2012, hal 1-13.
- McNaught, R. (2024). The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development – A global review. In *Environmental Science and Policy* (Vol. 151). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103627>
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, I. L., Suyatna, A., Setiawan, A., & Abdurrahman. (2022). Flood disaster mitigation modeling through participation community based on the land conversion and disaster resilience. *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09889>
- Petrova, K., & Rosvold, E. L. (2024). Mitigating the legacy of violence: Can flood relief improve people's trust in government in conflict-affected areas? Evidence from Pakistan. *World Development*, 173. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106372>
- Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* (Vol. 4, Issue 2). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Rehman, J., Sohaib, O., Asif, M., & Pradhan, B. (2019). Applying systems thinking to flood disaster management for a sustainable development. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101101>